BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan *(Agency Theory)*

Teori keagenan (*agency theory*) dikemukakan oleh Michael C. Jensen & William H. Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* sebagai pihak yang memberikan wewenang dan *agent* sebagai pihak yang menerima amanat untuk melaksanakan tugas serta mengambil keputusan atas nama *principal*. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Wibowo *et al.,* (2023), hubungan keagenan muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk mengelola sumber daya dan menjalankan aktivitas tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zaki *et al.,* (2023), bahwa *agent* memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh aktivitas sesuai dengan kepentingan *principal*. Teori keagenan didasarkan pada asumsi bahwa *principal* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat diperkuat oleh adanya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika *agent* memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan *principal*. Kondisi tersebut mendorong mekanisme pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan

mengurangi kesenjangan informasi antara kedua belah pihak.

2. Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan profesional yang disampaikan auditor berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Opini tersebut mencerminkan penilaian auditor terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan kriteria dan standar yang berlaku. Menurut Suandani *et al.,* (2021), laporan audit memuat pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan ketidakmampuan auditor untuk menyampaikan pendapat. Dalam sektor publik, opini audit menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kualitas penyajian laporan keuangan dan tingkat kepatuhan entitas terhadap ketentuan yang berlaku.

Menurut Agoes (2014:75), terdapat lima jenis opini audit, yaitu sebagai berikut.

a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

   Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah menyajikan informasi yang wajar dalam semua aspek material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)

   Opini ini disertai paragraf tambahan untuk menjelaskan kondisi atau informasi tertentu yang perlu diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan tanpa memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini ini diberikan ketika terdapat kondisi tertentu yang bersifat material, tetapi tidak memengaruhi keseluruhan penyajian laporan keuangan.

d. Tidak Wajar

Opini ini menunjukkan adanya penyimpangan material yang menyebabkan informasi dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

e. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini ini dinyatakan ketika auditor tidak memperoleh bukti audit yang memadai sehingga tidak dapat melakukan penilaian atas kewajaran laporan keuangan.

3. Temuan Audit BPK

Temuan Audit BPK merupakan hasil pemeriksaan yang diperoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses evaluasi atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi yang ditemukan selama pemeriksaan dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, maupun ketentuan lainnya. Menurut Ditasari *et al.,* (2020), temuan audit mencerminkan adanya ketidaksesuaian, penyimpangan, atau pelanggaran yang teridentifikasi dalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya berfokus pada kewajaran

penyajian laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas pengendalian internal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK merupakan lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Temuan audit yang dihasilkan BPK dapat berupa kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Aziz *et al.,* (2024) menjelaskan bahwa temuan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan adanya kondisi yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Informasi yang terkandung dalam temuan audit menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik melalui sumber pendapatan yang dihasilkan oleh daerah (Anynda *et al.,* 2020). Tingkat kemandirian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi fiskal yang dimiliki sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat

maupun pemerintah provinsi dapat dikurangi. Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembiayaan daerah melalui kontribusi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Nilai rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan secara lebih mandiri. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah turut memengaruhi besaran Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Besarnya kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

5. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Ditasari *et al.,* (2020), kinerja pemerintah daerah merupakan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kinerja tersebut mencerminkan hasil yang dicapai pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penilaian terhadap capaian tersebut diperlukan untuk mengetahui

efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi mengenai kinerja juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada periode berikutnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Judul: Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Penulis: Rollis Ayu Ditasari, M Agus Sudrajat Tahun: 2020	X1: Opini Audit X2: Temuan Audit BPK Y: Kinerja Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Timur 2. Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Timur
2.	Judul: Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, *Intergovernmental Revenue,* Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Penulis: Taufik Dasmar, Yesi Mutia Basri, Novita Indrawati	X1: Kekayaan Daerah X2: Belanja Daerah X3: *Intergovernmental Revenue* X4: Temuan Audit Y: Kinerja Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 2. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 3. *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

	Tahun: 2020			4. Temuan Audit (BPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
3.	Judul: Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Realisasi PAD sebagai Pemediasi Penulis: Ni Made Dwi Pradnyani, Ni Putu Sri Harta Mimba Tahun: 2020	X: Opini Audit Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Z: Realisasi PAD	*Path Analysis*	1. Opini Audit berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah 2. Opini Audit berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Realisiasi PAD berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4.	Judul: Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Penulis: Nur Shafira Anynda, Suwardi Bambang Hermanto Tahun: 2020	X1: Rasio Kemandirian Daerah X2: Efektifitas Pendapatan Asli Daerah X3: Pengelolaan Belanja Daerah Y: Kinerja Keuangan Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah 2. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah 3. Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah
5.	Judul: Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan	X1: Opini Audit X2: Belanja Modal X3: Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

	Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019 Penulis: Kadek Peni Suandani, I Gede Putu Banu Astawa Tahun: 2021	X4: Dana Perimbangan Y: Kinerja Keuangan Pemerintah		2. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 4. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 5. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
6.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Penulis: Maulana Ramadhan, Memen Kustiawan, Fitriana Tahun: 2022	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Pengelolaan Belanja Daerah X3: Kemandirian Keuangan Daerah Y: Kinerja Keuangan Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah 3. Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah
7.	Judul: Pengaruh Kemandirian Keuangan dan	X1: Kemandirian Keuangan X2: Belanja Modal	Regresi Linear Berganda	1. Kemandirian Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

	Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi Penulis: Mahardika Burhan, Kartini, Darwis Said Tahun: 2022	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Z: Pertumbuhan Ekonomi		Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Pertumbuhan Ekonomi memperkuat peran moderasi Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
8.	Judul: Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Penulis: Doni Hakiki, Tumija, Ika Agustina Tahun: 2023	X1: Rasio Kemandirian Daerah X2: Belanja Daerah Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan memiliki hubungan yang tidak searah 2. Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan memiliki hubungan yang tidak searah 3. Secara bersama-sama, Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja

				Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
9.	Judul: Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021 Penulis: Nur Afifah Azzahro, Murhaban, Ikhyanuddin, Nurhasanah Tahun: 2023	X1: Rasio Kemandirian Daerah X2: *Intergovernmental Revenue* Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Rasio Kemandirian daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. *Intergovernmental Revenue* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
10.	Judul: Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penulis: Adnan Abdul Aziz, Eny Kusumawati Tahun: 2024	X1: Ukuran Pemerintah Daerah X2: Tingkat Kekayaan Daerah X3: Tingkat Ketergantungan Pada Pusat X4: Pertumbuhan Ekonomi X5: Temuan Audit BPK Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Tingkat Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

				4. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 5. Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
11.	Judul: Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara Penulis: Nabilla Dwi Agintha Tahun: 2024	X1: Pemerintah Daerah X2: Temuan Audit BPK Y: Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	1. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019 2. Tingkat Kekayaan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019 3. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019

				4. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019 5. Temuan Audit BPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara 2016-2019
12.	Judul: Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penulis: Sefhvira Chilly Bella Tiara Sedek, Eny Kusumawati Tahun: 2024	X1: Leverage X2: Tingkat Kekayaan Daerah X3: Tingkat Ketergantungan pada Pusat X4: Temuan Audit BPK X5: Pendapatan Pajak Daerah Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Tingkat Ketergantungan pada Pusat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 4. Tingkat Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 5. Pendapatan Pajak Daerah tidak berpengaruh

				terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
13.	Judul: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penulis: Fatimah Az Zahrah, Muhammad Rafi Zaen, Salma Putri Mellinia Tahun: 2024	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Opini Audit X3: Belanja Modal Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Opini Audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
14.	Judul: Pengaruh Opini Audit BPK dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penulis: Mega Nurhalimah, Dimas Wicaksono Tahun: 2024	X1: Opini Audit BPK X2: Belanja Modal Y: Kinerja Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	1. Opini Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Belanja Modal berpengaruh positid terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
15.	Judul: Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah Berkonsep *Value for Money* saat Covid 19	X1: Opini Audit X2: Temuan Audit Y: Kinerja Pemerintah	Regresi Linear Berganda	1. Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep *Value for Money* (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan

	Penulis: Dewi Safitri, Djauhar Edi Purnomo, M. Fitrayudi T Tahun: 2024			Efektivitas) saat COVID 19 2. Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep *Value for Money* (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19 3. Opini Audit dan Temuan Audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep *Value for Money* (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19
16.	Judul: Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Penulis: Fadiya Salma Sukman, Sri Fadilah, Nurhayati Tahun: 2025	X: Kemandirian Keuangan Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear	Kemandirian Keuangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2017-2023.
17.	Judul: Determinan	X1: Karakteristik Pemerintah Daerah X2: Temuan Audit X3: Opini Audit	Regresi Linear Berganda	1. Tingkat Kekayaan Daerah tidak memiliki pengaruh

	Karateristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Penulis: Rolia Wahasusmiah Tahun: 2025	Y: Kinerja Pemerintah Daerah		signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 2. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 3. Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 4. Opini Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
18.	Judul: Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Penulis Reginald Gogo Acacius Dao, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo Tahun: 2025	X1: Karakteristik Pemerintah Daerah X2: Temuan Audit BPK Y: Kinerja Pemerintah	Regresi Linear Berganda	1. Ukuran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah 2. Temuan Audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah 3. Kekayaan Daerah, Ketergantungan Fiskal, dan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah
19.	Judul: Pengaruh Opini Audit dan Temuan	X1: Opini Audit X2: Temuan Audit	Regresi Linear Berganda	1. Opini Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap

	Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023) Penulis: Dilla Aprilia, Raden Budi Hendaris Tahun: 2025	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah		Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023 2. Temuan Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023 3. Secara parsial Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023 4. Secara parsial Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023
20.	*Title:* *Audit Opinion and Financial Performance of Local Governments in East Nusa Tenggara* *Authors*: Jennie S. Sir, Selfesina Samadara, Deetje W. Manuain	X1: *Audit Opinion* X2: *Financial Performance* Y: *Local Governments*	*Multiple Linear Regression*	1. Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur. 2. Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Year: 2020			dan realisasi Belanja Operasional
21.	*Title:* *The Effect of Financial Conditions and Audit Opinions on Local Government Performance* *Authors:* Handoko Arwi Hasthoro, Yanuar Saksono, Nining Widiyanti *Year:* 2020	X1: *Financial Conditions* X2: *Audit Opinions* Y: *Local Government Performance*	*Multiple Linear Regression*	1. Kondisi Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 2. Opini Audit memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
22.	*Title:* *The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance* *Authors*: Yulia Wijayanti, Dhini Suryandari *Year*: 2020	X1: *Regional Characteristics* X2*: Leverage* X3: *Government Complexity* X4: *BPK Audit Findings* X5: *BPK Audit Opinions* Y: *Local Government Financial Performance*	*Multiple Linear Regression*	1. Ukuran Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 4. Tingkat Kekayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 5. Rasio Utang tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

				6. Kompleksitas Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 7. Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 8. Secara simultan, seluruh variabel independen dalam penelitian memiliki hubungan dan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
23.	*Title:* *The Effect of Audit Findings and Recommendation Follow Ups of BPKRi's Evaluation on Local Government's Performance in Districts/Cities East Java Province* *Authors:* Garsuarani Octavianti Ningsih, Sugiharti Binastuti *Year:* 2021	X1: *Audit Findings* X2: *Follow-up Actions on BPK RI Audit Recommendations* Y: *Local Government Performance*	*Multiple Linear Regression*	1. Temuan Audit berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur 2. Tindak Lanjut Rekomendasi dari Evaluasi BPK RI berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur .
24.	*Title:* *Influence of Financial Audit Findings, Governments Wealth, Size of Government*	X1: *Financial Audit Findings* X2: *Governments Wealth* X3: *Size of Government*	*Multiple Linear Regression*	1. Temuan Audit BPK secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah

	and Leverage on The Performance of Regency/City Governments in Indonesia *Authors:* Andri Nugraha *Year:* *2*021	X4: *Leverage* Y: *The Performance of Regency/City Governments*		kabupaten/kota di Indonesia 2. Leverage secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia 3. Kekayaan negatif pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia 4. Ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia 5. Secara simultan, Temuan Audit BPK, Kekayaan Pemerintah, Ukuran Pemerintah, serta Leverage secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
25.	*Title:* *The Effect of Regional Wealth, Regional Dependence Level, and Regional Financial*	X1: *Regional Wealth* X2: *Regional Dependence Level* X3: *Regional Financial Independence*	*Multiple Linear Regression*	1. Kekayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Fiskal 2. Tingkat Ketergantungan memiliki pengaruh

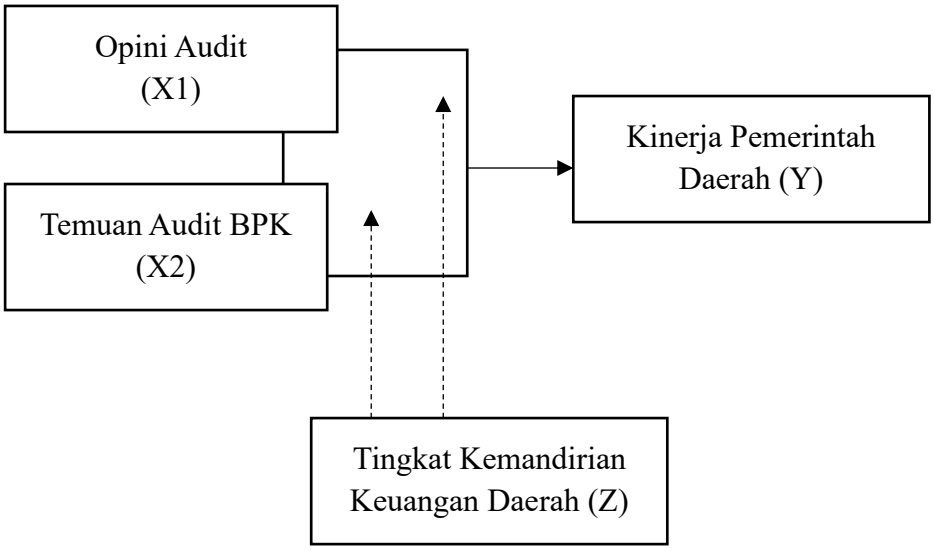
	Independence on Fiscal Performance *Authors:* Fita Maulidya, Rahmat Yuliansyah *Year:* 2022	*Y: Fiscal Performance*		positif dan signifikan terhadap Kinerja Fiskal 3. Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Fiskal 4. Secara simultan, Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Fiskal
26.	*Title:* *The Effect of Audit Opinion and Audit Findings on the Level of Disclosure of Local Government Financial Statements at Regency/City in Maluku Province 2016-2021* *Authors:* *Rosa Evalin Pattipawaey, Senda Y.Leatemia* *Year:* 2023	X1: *Audit Opinion* X2: *Audit Findings* Y: *Level of Disclosure of Local Government Financial Statements*	*Multiple Linear Regression*	1. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Keterbukaan Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah 2. Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Tingkat Keterbukaan Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah
27.	*Title:* *The Effect of Budget, Audit and Government Performance: Empirical Evidence from Indonesian*	X1: *Budget* X2: *Audit* Y: *Government Performance*	*Multiple Linear Regression*	1. Opini Audit secara langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah 2. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja

	Regional Governments *Authors:* Abdul Kahar, Andi Chairil Furqan, Tenripada Tenripada *Year:* 2023			Operasional Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah
28.	*Title:* *The Impact of The Characteristics of Local Governments And The Results of BPK Audits on The Performance of Governance In Papua and West Papua* *Authors:* Adolf Z. D. Siahay, Rezianof R. Siahay *Year:* 2023	X1: *Local Government Size* X2: *Regional Wealth* X3: *Fiscal Dependency* X4: *Capital Expenditure* Y: *Results of* BPK *Audits*	*Multiple Linear Regression*	1. Kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah 2. Ketergantungan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah 3. Opini Audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah 4. Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah 5. Belanja Modal Pemerintah Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah 6. Temuan Audit BPK berpengaruh

				negatif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah
29.	*Title:* *The Influence of Audit Opinions and BPK Audit Findings on Performance North Sumatra High Prosecutor's Office* *Authors:* Vivi Hardiyanti Sakinah Damanik, Yeni Widiastuti *Year:* 2024	X1: *Audit Opinion* X2: *BPK Audit Findings* Y: *Performance of the North Sumatra High Prosecutor's Office*	*Multiple Linear Regression*	1. Opini Audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 2. Temuan Audit BPK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
30.	*Title:* *The Influence of Local Government Financial Characteristics and BPK Audit Results on Government Financial Performance* *Authors:* *Dhea Putri Rizqi Safitri, Devy Pusposari* *Year:* 2025	X1: *Local Government Financial Characteristics* X2: *BPK Audit Results* Y: *Government Financial Performance*	*Multiple Linear Regression*	1. Tingkat Kemakmuran Daerah memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah 2. Tingkat Ketergantungan Daerah memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah 3. Temuan Audit memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah 4. Ukuran Pemerintah Daerah tidak memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah 5. Opini Audit tidak memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai hubungan antarvariabel yang digunakan sebagai dasar dalam memahami arah keterkaitan dan pengaruh antarvariabel dalam penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan hipotesis serta memberikan gambaran mengenai pola hubungan yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, Opini Audit dan Temuan Audit BPK ditempatkan sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen. Sementara itu, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berperan sebagai variabel moderasi yang diperkirakan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah (2026)

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dirumuskan berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta hubungan antarvariabel yang telah dijelaskan dalam kerangka konseptual. Hipotesis disusun untuk memberikan arah dalam proses pengumpulan dan analisis data guna menguji hubungan antarvariabel yang diteliti. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Pradnyani *et al.,* (2020), opini audit merupakan penilaian yang diberikan oleh auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Opini audit menjadi salah satu bentuk evaluasi atas kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini audit yang lebih baik cenderung memiliki kualitas pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas pengelolaan keuangan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penelitian terkait opini audit yang dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan pemerintah (Suandani *et al.,* 2021). Penelitian terkait opini audit juga dilakukan oleh Pradnyani *et al.,* (2020) dengan hasil penelitian bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian Sir *et al.*, (2020) juga mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur. Hasil serupa juga ditemukan oleh Wijayanti *et al.,* (2020) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H1: Opini Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

2. **Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Wijayanti *et al.,* (2020), temuan audit BPK merupakan hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan selama proses audit. Temuan audit memberikan informasi mengenai kondisi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. Keberadaan temuan audit dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Semakin banyak temuan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, semakin banyak pula permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, temuan audit sering dikaitkan dengan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.

Penelitian terkait temuan audit BPK yang dilakukan oleh Sedek *et al.,* (2024) menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian terkait temuan audit juga dilakukan oleh Safitri *et al.,* (2025) dengan hasil penelitian bahwa temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Ditasari *et al.,* (2020) juga menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

H2: Temuan Audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

3. **Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dimoderasi oleh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Maulidya *et al.,* (2022), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Tingkat kemandirian keuangan yang tinggi mencerminkan rendahnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap

dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemampuan tersebut dapat mendukung pelaksanaan program pemerintahan serta tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang diberikan dalam hasil pemeriksaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sir *et al.,* (2020) pada pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Sukman *et al.,* (2025) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi cenderung lebih mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit secara efektif.

H3: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memperkuat pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

4. **Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dimoderasi oleh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Sukman *et al.,* (2025), kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi umumnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah. Kapasitas tersebut juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Sedek *et al.,* (2024) menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Burhan *et al.,* (2022) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi cenderung lebih mampu menindaklanjuti temuan audit BPK melalui perbaikan sistem pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah.

H4: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memperkuat pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.